

**ANALISIS YURIDIS POLITIK HUKUM
PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM KONSEP NEGARA KESATUAN
(Studi Kasus Tinjauan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum**



Oleh:

**ALDI
072322006**

Dosen Pembimbing:

**Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.
Dr. Mustaqim, S.H., M.Kn.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
2024**

**ANALISIS YURIDIS POLITIK HUKUM
PENGATURAN PEMERINTAHAN DAERAH
DALAM KONSEP NEGARA KESATUAN
(Studi Kasus Tinjauan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau)**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum**



Oleh:

**ALDI
072322006**

Dosen Pembimbing:

**Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.
Dr. Mustaqim, S.H., M.Kn.**




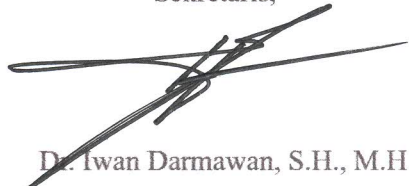
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR
2024**

LEMBAR PENGESAHAN

Aldi

NPM. 072322006

ANALISIS YURIDIS POLITIK HUKUM PENGATURAN PEMERINTAHAN
DAERAH DALAM KONSEP NEGARA KESATUAN
(Studi Kasus Tinjauan Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau)

Disetujui dan Disahkan oleh Pembimbing Tesis	
<p>Pembimbing Utama</p>  <p>Prof. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.</p>	<p>Pembimbing Pendamping</p>  <p>Dr. Mustaqim, SH., M.Kn.</p>
Tanggal	Tanggal
Disetujui dan Disahkan oleh Panitia Ujian Magister	
<p>Ketua, ¹⁾</p>  <p>Prof. Dr. Ing. H. Soewarto Hardhienata</p>	<p>Sekretaris, ²⁾</p>  <p>Dr. Iwan Darmawan, S.H., M.H.</p>
Tanggal	Tanggal
No. Registrasi :	
Tanggal Lulus : 28 Juni 2024	

Keterangan :

- ¹⁾ Dekan Sekolah Pascasarjana
- ²⁾ Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai landasan politik hukum yang membawa implikasi perubahan sistem pemerintahan sentralisasi ke desentralisasi. Indonesia adalah negara yang wilayahnya dibagi menjadi wilayah provinsi, yang dibagi atas kabupaten dan kota. Pembentukan provinsi, kabupaten, dan kota harus ditetapkan dengan undang-undang. Dalam upaya pembentukan daerah dilakukan apabila memenuhi unsur pertimbangan daerah dan syarat teknis prosedur pembentukan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Jenis penelitian ini digunakan penelitian hukum normatif, di mana dalam penelitian ini di dasarkan pada bahan hukum Pustaka dan data sekunder belaka, penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini bertujuan mencoba mengungkap dinamika pengambilan kebijakan politik hukum terkait dengan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dan memberikan gambaran bagaimana proses pembentukan wilayah yang terjadi di Indonesia berdasarkan kaitannya politik hukum yang ada. Kajian penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan atau pembentukan Provinsi Kepulauan Riau merupakan sebuah fenomena baru dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang menyebabkan beberapa polemik di antara masyarakat hal ini disebabkan pemekaran Provinsi Kepulauan Riau melalui tahapan mekanisme tidak biasa yaitu menggunakan pendekatan politik luar biasa melalui Hak Usul Inisiatif DPR RI yang mengundang Undang-Undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pemekaran Daerah, Politik Hukum Pembentukan Daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pembentukan Provinsi Kepri.

Abstract

The birth of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government as a legal political foundation that has implications for changing the centralized government system to decentralization. The formation of provinces, districts, and cities must be established by law. In an effort to form a region, it is carried out if it meets the elements of regional considerations and technical requirements for regional formation procedures regulated in Government Regulation Number 129 of 2000 concerning Requirements for Formation and Criteria for Regional Expansion, Elimination and Merger. This type of research is used normative legal research, where in this research is based on library legal materials and mere secondary data, this research is also referred to as doctrinal legal research. This study aims to reveal the dynamics of legal political policy making related to the formation of Riau Islands Province and provide an overview of how the process of regional formation occurs in Indonesia based on the existing legal political link. This research study concluded that the establishment or establishment of Riau Islands Province is a new phenomenon in the implementation of regional autonomy which causes several polemics among the community, this is due to the expansion of Riau Islands Province through an unusual mechanism stage, namely using an extraordinary political approach through the Right to Propose Initiative of the House of Representatives of the Republic of Indonesia which promulgated Law Number 25 of 2002 concerning the Establishment of Riau Islands Province.

Keywords: Regional Autonomy, Regional Expansion, Legal Politics of Regional Formation, Unitary State of the Republic of Indonesia, Establishment of Kepri Province.